

**HAK WARIS AYAH KETIKA PEWARIS TIDAK
MENINGGALKAN ANAK
(Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 177)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

**SYAFRI ABRORI
NIM. 10921005447**

**PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : *Hak Waris Ayah Ketika Pewaris Tidak Meninggalkan Anak (Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 177)*. Di dalam al Quran surat al Nisa' ayat 11, dan hadits Rasulullah Saw menyatakan bahwa, ketika seseorang meninggal dunia (pewaris), dalam keadaan tidak meninggalkan anak, maka ayah mendapat bagian '*ashabah* (mendapatkan sisa harta). Hal ini disebabkan, ayah adalah kerabat laki - laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris.

Perbedaan mendasar terdapat pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "ayah mendapat sepertiga jika pewaris tidak meninggalkan anak, jika ada anak ayah mendapat seperenam".

Berdasarkan hal tersebut maka, dirumuskan dua permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu : Bagaimana hak waris ayah menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 177, dan hak waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui hak waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam, dan untuk mengetahui hak waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bersifat *normatif*. Sebagai bahan hukum primer adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 177, pendekatan penelitian yang digunakan adalah *statute approach*, yakni menelaah pasal 177. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode analisa yang digunakan adalah deskriptif, yuridis normatif dan deduktif.

Penelitian terhadap pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Kompilasi Hukum Islam menetapkan bagian ayah sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan ahli waris ibu dan suami. Kedua, ayah mendapatkan bagian sepertiga, dalam keadaan ahli waris hanya meninggalkan ahli waris ayah, ibu dan

suami, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali. Hal tersebut juga tidak tercantum dalam pembahasan para pakar hukum waris Islam (termasuk Syiah dan Hazairin). Sedangkan, ayah mendapatkan bagian seperenam ketika ahli waris ada meninggalkan anak, telah sesuai dengan Hukum Waris Islam (fiqh faraidh).

Keberadaan Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam, tentang ayah mendapatkan sepertiga ketika pewaris meninggalkan ahli waris ayah, ibu dan suami, perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan konsep Hukum Kewarisan Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt, karena dengan limpahan rahmat serta karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan judul “ **Hak Waris Ayah Ketika Pewaris Tidak Meninggalkan Anak (Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 177)**”. Selanjutnya shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Saw.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis menyadari tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka penulis ingin sekali menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi tingginya, kepada :

1. Ayahanda Naib Fakhruddin Sinaga S.PdI, dan Ibunda Hamidah. Beliau telah banyak berkorban, memberikan bantuan moril, dan materil. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Swt.
2. Bapak Prof. DR. H.M. Nazir selaku Rektor, dan Bapak Pembantu Rektor. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti perkuliahan dikampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III, dan Bapak/Ibu dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Bapak DR. Hajar M, MH. Selaku pembimbing, telah memberikan bimbingan, dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, dan Bapak Sekretaris Jurusan. Yang telah berjasa dalam memberikan pelayanan akademik kepada penulis.
6. Keluarga, dan sanak saudara (Nurhidayati, Suwaibah, Najamuddin Sinaga, Zulhairroh, Mawaddah, Zulkifli Sinaga dan M. Arrofiq Sinaga). Yang selalu memberikan dorongan, dan motivasi. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Pengurus, dan jamaah Masjid Al Muttaqin RW XI Perum. Graha Rajawali Permai. Yang telah memberikan bantuan moril dan materil.
8. Teman teman seperjuangan, khususnya yang berada di jurusan Ahwal Syakhsiyyah angkatan 2009. Semoga teman teman semua diberikan kesuksesan oleh Allah Swt.

Akhirnya, penulis hanya bisa mendoakan. Semoga Allah Swt membalas semua jasa-jasanya dengan pahala yang berlipat ganda. *Amiin Ya Rabbal 'Alamin..*

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

NOTA PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR..... i

ABSTRAK ii

DAFTAR ISI iv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian7

D. Metode Penelitian 7

E. Sistematika Penulisan 10

BAB II AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Dan Dasar Hukum..... 11

B. Keutamaan Diantara Ahli Waris 15

C. Hak Ahli Waris 21

BAB III KAJIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam 29

B. Kekuatan Hukum Kompilasi Hukum Islam 38

C. Materi Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam 40

**BAB IV HAK KEWARISAN AYAH DALAM KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI)**

A. Hak Kewarisan Ayah	49
B. Hak Kewarisan Ayah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam	58

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

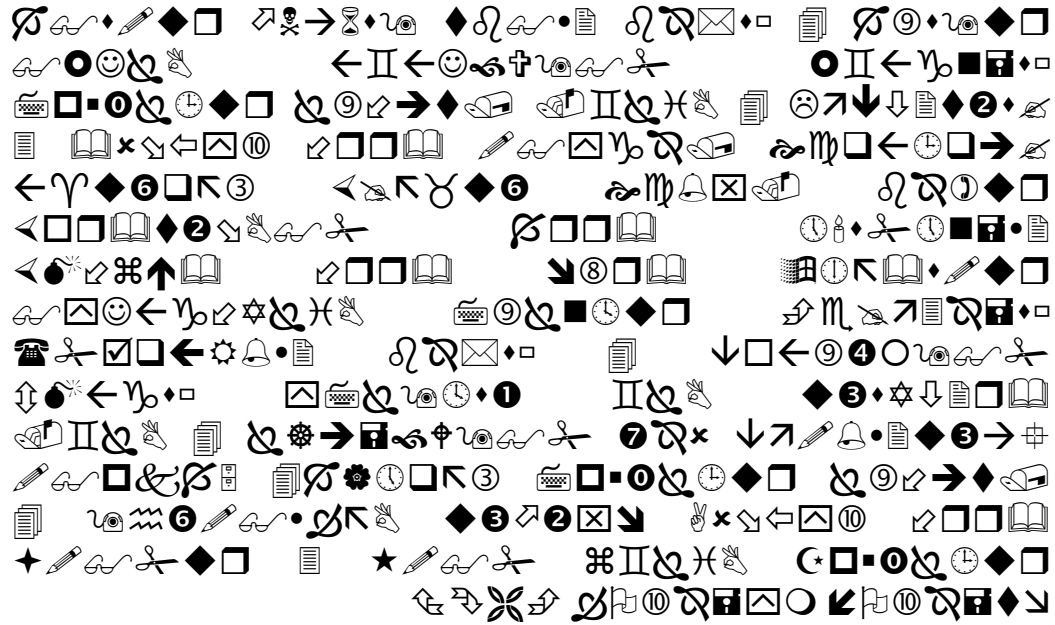
Salah satu unsur berlakunya Hukum Kewarisan Islam yaitu adanya ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹

Ahli waris dikelompokkan menjadi dua, yaitu : ahli waris karena hubungan kerabat, dan ahli waris hubungan karena perkawinan, yang termasuk ahli waris karena hubungan kerabat adalah, anak laki laki dan anak perempuan, cucu laki laki dan cucu perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara, baik laki laki atau perempuan, anak dari saudara, paman, dan anak paman.

Sedangkan ahli waris karena hubungan perkawinan, yaitu : suami dan istri. Suami menjadi ahli waris dari istrinya yang meninggal dunia, begitu pula sebaliknya isteri menjadi ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia. Dasar hukumnya adalah al Quran surat al Nisa' ayat 12.



¹ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), cet. ke I, h. 32.



Artinya : “ Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun”. (QS. al Nisa' : 12).²

² Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Diponegoro, 2008), cet. ke X, h.79.

Ahli waris hubungan kerabat dan ahli waris hubungan perkawinan yang telah dikemukakan, masing masing berhak mendapatkan hak kewarisan. Secara umum hak kewarisan mereka ditetapkan menjadi dua macam yaitu : ahli waris yang telah ditentukan secara pasti bagiannya disebut dengan *dzul furudh*, dan ahli waris yang tidak ditentukan secara pasti bagiannya disebut dengan *ashabah*.

Ahli waris *ashabah* mendapat seluruh harta warisan, setelah dikeluarkan bagian warisan untuk ahli waris *dh. Ashabah* dalam bahasa Arab dikhususkan untuk ahli waris yang laki laki maka, yang berhak atas seluruh sisa harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah ahli waris yang laki laki.

Ahli waris *ashabah* dibedakan menjadi tiga, yaitu : pertama, *ashabah binafsih*, yaitu : *ashabah* dengan sendirinya tanpa bantuan ahli waris lain³, mereka adalah ahli waris yang laki laki dan berhak atas seluruh sisa harta yaitu : anak laki laki, cucu laki laki, ayah, kakek, saudara laki laki kandung, saudara laki laki seayah, anak laki laki dari saudara laki laki kandung, anak laki laki dari saudara laki laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki laki dari paman kandung dan anak laki laki dari paman seayah.

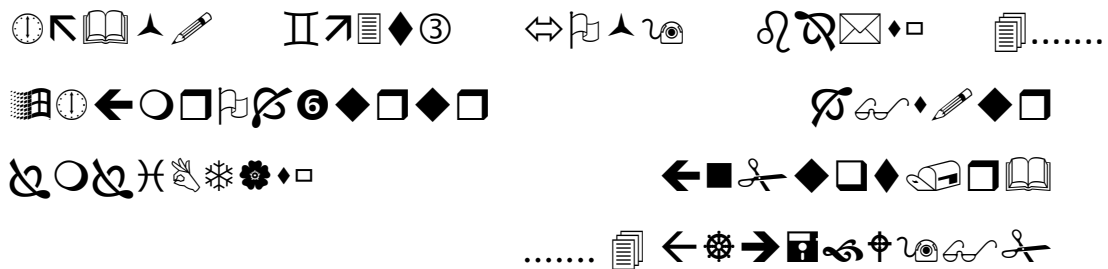
Kedua, *ashabah bighairihi* yaitu : ahli waris perempuan yang mewarisi bersama dengan saudara laki laki dan bersama sama menjadi *ashabah*. Mereka adalah, anak perempuan jika mewarisi bersama dengan anak laki laki, cucu perempuan bila mewarisi bersama dengan cucu laki laki, saudara perempuan

³ *Ibid.*,h. 44.

kandung bila mewarisi bersama dengan saudara laki laki kandung, dan saudara perempuan seayah bila mewarisi bersama dengan saudara laki laki seayah.

Ketiga, *ashabah ma'a ghairihi* yaitu : saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah yang berstatus *ashabah* dan mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, dan ketika itu tidak terdapat anak laki laki atau cucu laki laki dan ahli waris *ashabah binafsih*⁴.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa, ahli waris yang termasuk ke dalam kelompok *ashabah binafsih* adalah ayah. Ayah menjadi *ashabah binafsih* apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki laki atau cucu laki, dan ayah mendapat $\frac{1}{6}$ +siswa ketika pewaris meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki laki⁵. Hal ini sesuai dengan al Quran surat al- Nisa' ayat 11, sebagai berikut :



Artinya : “Tetapi apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan yang menjadi ahli warisnya ibu dan ayah maka ibu mendapat sepertiga”.

(QS. al Nisa' : 11) .⁶

⁴ Hajar M, *op. cit.* , h. 45.

⁵ Muhammad Ali ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, alih bahasa oleh AM Basamalah, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), cet. ke I, h. 34.

Selanjutnya hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra.

إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخارى و مسلم وغير ها).

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian faraidh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)." (HR. Bukhari, Muslim dan lainnya)⁷”.

Ayah sebagai ahli waris posisinya tidak dapat ditutup oleh ahli waris yang lain, jika pewaris tidak meninggalkan anak maka kedudukannya menjadi *ashabah* atau menerima sisa harta. Ayah menerima bagian *ashabah* dikarenakan ayah adalah ahli waris laki laki yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris ketika pewaris tidak meninggalkan anak⁸.

Di Indonesia terdapat Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum di Pengadilan Agama. Pada Kompilasi Hukum Islam terdapat

⁶ Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Diponegoro, 2008), cet. ke X, h. 79.

⁷ Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo : Dar al Mathaba'ah al Sya'bi, tth) jilid V, h. 47.

⁸ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : al Maarif, 1981), cet. ke I, h. 48.

tiga buku. Buku I hukum perkawinan pasal (1-170), buku II hukum kewarisan pasal pasal (171 - 214), dan buku III hukum perwakafan pasal (215-229)⁹.

Pada buku II hukum kewarisan, pasal 177 menyatakan bahwa, “ayah mendapat bagian sepertiga jika tidak ada anak bila ada anak ayah mendapat seperenam”.¹⁰

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Waris Islam* mengatakan “Berkaitan pada pasal ini walaupun rumusan pasal ini konon telah mengalami perubahan tetapi tidak mengubah secara substansil. Bahwa ayah menerima seperenam dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak, jelas telah sesuai dengan al Quran, maupun rumusannya dalam fiqih. Tetapi menetapkan ayah menerima bagian sepertiga dalam keadaan tidak ada anak, tidak terdapat dalam al Quran, tidak tersebut dalam kitab fiqih manapun, termasuk Syiah. Ayah mungkin mendapat sepertiga tetapi tidak sebagai *furudh*, itupun dalam kasus tertentu seperti bersama dengan ibu dan suami, dengan catatan ibu menerima sepertiga harta, sebagaimana yang lazim berlaku dalam madzhab jumhur Ahlu Sunnah. Namun bukan bagian sepertiga untuk ayah yang disebutkan dalam Kompilasi. Kalau al Quran dan fiqih yang dijadikan ukuran, pasal ini jelas salah secara substansial”¹¹.

⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), cet. ke III, h. 56.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 Tahun 1991, (Bandung : PT. Citra Umbara, 2009), cet. ke III, h. 293.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2005) cet. ke II, h. 331.

Salah satu ijtihad baru yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 177, tentang hak waris ayah mendapat sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan anak. Sedangkan secara teori hukum waris Islam menyatakan ayah menjadi *ashabah binafsih* yaitu, ayah menerima sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *dzul furudh*.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dan menuangkannya dalam sebuah judul “**Hak Waris Ayah Ketika Pewaris Tidak Meninggalkan Anak (Studi Kompilasi Hukum Islam Pasal 177)**”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hak waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam?
- b. Bagaimana hak waris ayah ditinjau menurut perspektif hukum Islam?

C. Tujuan

- a. Untuk mengetahui hak waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui hak waris ayah dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

D. Manfaat

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan khasanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Kewarisan Islam.

Secara praktis penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna dalam memberikan pemahaman kepada kaum muslimin tentang hak waris ayah yang terdapat dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam. penelitian

ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka¹². Penelitian hukum normatif ini mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang¹³.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *statute approach*. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti peraturan perundang undangan, norma norma, atau aturan aturan hukum yang menjadi topik sentral dalam sebuah penelitian¹⁴. Fokus penelitian ini tentang KHI pasal 177. ditelaah secara mendalam, kemudian ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data

a. Sumber

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), cet. ke I, h. 32.

¹³ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti, 2004), cet. ke I, h. 41.

¹⁴ Jhony Ibrahim , *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2008), cet. ke IV, h. 302.

Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan sumber data merupakan bahan skunder, selanjutnya bahan skunder dikelompokkan kedalam tiga kategori¹⁵, yaitu :

Bahan hukum primer; Bahan pokok yang menjadi objek dalam penelitian, sebagai bahan pokok pada penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam buku ke II tentang hukum kewarisan pasal 177 .

Bahan hukum skunder adalah : buku buku tentang hukum kewarisan Islam seperti : *Hukum Waris Islam* karangan Amir Syarifuddin, *Ilmu Waris* karangan Fatchurrahman *Hukum Kewarisan Islam (Fiqih Mawaris)* karangan Hajar M, jurnal - jurnal tentang hukum kewarisan, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam.

Bahan hukum tersier; yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus hukum dan ensklopedia.

b. Metode Pengumpulan Data

Sumber bahan hukum yang sebagian berasal dari bahan kepustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari dan mengumpulkan

¹⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), cet. ke I, h. 3.

literatur literatur yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, agar dapat disajikan secara komprehensif ¹⁶.

4. Metode Analisa Data

Deskriptif, Penulis mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tentang hak waris ayah.

Yuridis normatif yaitu, menelaah makna yang terdapat dalam sebuah peraturan perundang undangan.¹⁷ Dalam hal ini yang akan ditelaah adalah, pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.

Deduktif, setelah mendeskripsikan dan menelaah pasal 177 maka, langkah selanjutnya menarik kesimpulan secara khusus.

5. Sistematika Penulisan

Bab pertama: pendahuluan. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua : ahli waris menurut hukum Islam. Pengertian ahli waris dan dasar hukum ahli waris, keutamaan diantara ahli waris, dan hak ahli waris.

Bab Ketiga : kajian Kompilasi Hukum Islam. Sejarah Kompilasi Hukum Islam, kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam, dan materi hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab Keempat: hak kewarisan ayah dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hak kewarisan ayah ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

¹⁶ Jhony Ibrahim, *op. cit.*, h. 328.

¹⁷ *Ibid.*, h. 328.

Bab Kelima: kesimpulan dan saran.

BAB II

AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum

1. Pengertian

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (pewaris).¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²

Menurut Sajuti Thalib ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan, dan dalam literatur lain disebutkan bahwa ahli waris adalah seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.³

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta warisan disebabkan adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan

¹ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam (Fiqh Mawaris)*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), cet . ke I, h. 32.

² Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 Tahun 1991, (Bandubg : Citra Umbara, 2008), cet. ke III, h. 56.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat DiIndonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada , 2002), cet . ke I, h. 38.

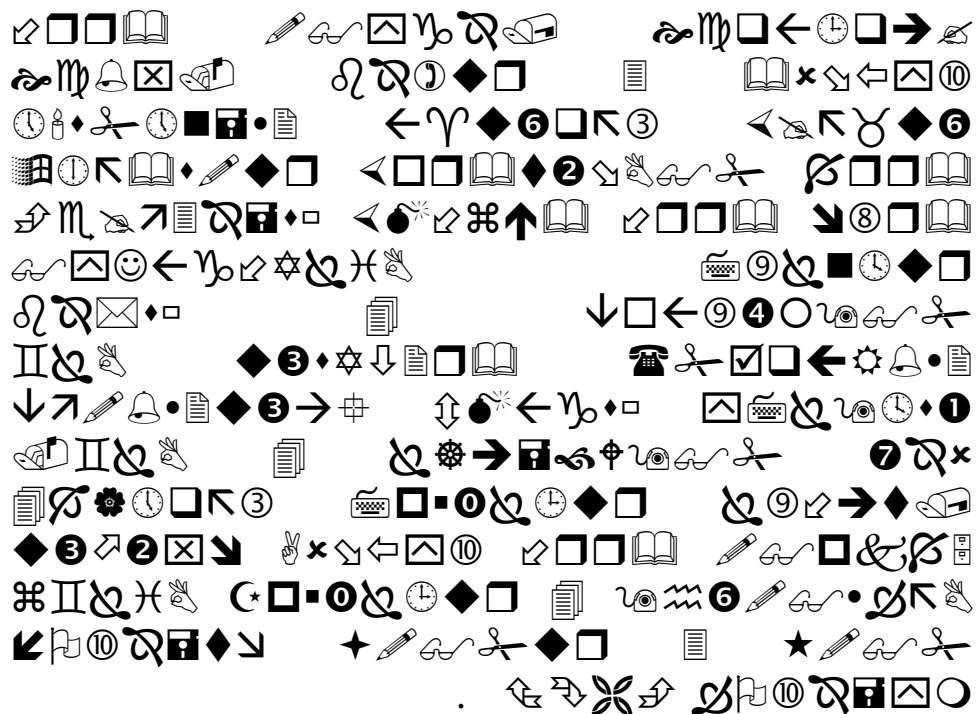
dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang haknya secara hukum untuk mendapatkan hak waris .

2. Dasar Hukum

a. al Quran

Ada beberapa ayat dalam alQuran yang langsung berkenaan dengan ahli waris , yaitu surat al Nisa' ayat 11.





Artinya : “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi maha penyantun. (QS. al Nisa' : 12).⁵

⁵ Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Diponegoro, 2008), cet. ke X, h. 78.

b. Hadits

Hadits Rasulullah SAW yang secara langsung berkenaan dengan ahli waris diantaranya adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra , sebagai berikut :

Artinya :“ Dari Musa Bin Ismail, dari Wuhaib, dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi Saw berkata “ berikanlah faraidh (bagian bagian yang telah ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikan kepada ahli waris laki laki yang paling dekat”. (HR.Bukhari dan yang lainnya).⁶

B. Keutamaan Diantara Ahli Waris

Hukum Kewarisan Islam mengakui adanya prinsip prinsip keutamaan didalam hubungan kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada pewaris antara seseorang dengan yang lainnya. Umpama anak lebih dekat dengan dibandingkan dengan cucu, begitupula dengan ayah lebih dekat kepada sianak dibandingkan dengan saudaranya .

Keutamaan dapat juga disebabkan oleh kuatnya hubungan kekerabatan, umpama saudara kandung lebih utama dibanding saudara seayah atau seibu, karena saudara kandung mempunyai dua garis kekerabatan yaitu

⁶ Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Kairo : Daar al Mathabaah al Sya'bi, tth), cet . ke IV, h. 181.

melalui ayah dan ibu, sedangkan saudara seayah hanya melalui garis ayah dan saudara seibu hanya melalui garis ibu.⁷

Dalam hukum Islam keutamaan itu lebih banyak ditentukan oleh jarak hubungan daripada garis kekerabatan. Oleh karena itu anak dalam garis keturunan kebawah tidak lebih utama dari ayah dalam garis keturunan keatas, karena kedua belah pihak mempunyai jarak hubungan yang sama.

Keutamaan terhadap ahli waris menyebabkan pihak kerabat tertentu tertutup (terhalang) dalam mendapatkan hak warisnya. Hal ini menandakan bahwa hukum kewarisan Islam memakai prinsip hijab dalam menentukan ahli waris.

Hijab secara bahasa berarti *al man u* yang berarti menghalangi atau mencegah. Sedangkan secara istilah adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang karena adanya ahli waris yang lebih utama daripadanya, karena itu haknya tertutup.⁸

Hijab terdiri dari dua macam, yaitu : *hijab hirman* dan *hijab nuhsan*

- a. Hijab *hirman* yaitu, tertutupnya hak seorang ahli waris untuk seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama daripadanya, seperti saudara dari orang yang meninggal dunia tertutup haknya jika yang meninggal dunia itu meninggalkan anak atau cucu. Demikian pula cucu jika ada anak laki laki yang meninggal dunia.

⁷ Amir Syarifuddin , *Hukum Waris Islam* , (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005), cet . ke II h. 47.

⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif DiIndonesia* , (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),cet . ke I, h. 38.

Dari seluruh kerabat yang tidak tertutup (*hijab*) haknya kecuali jika ada penghalang, yaitu : Suami, anak baik laki laki maupun perempuan, ayah, ibu.

Ahli waris yang menjadi mahjub karena adanya *hijab hirman*, sebagai berikut :

- a. Kakek, *mahjub* oleh ayah
- b. Nenek garis ibu *mahjub* oleh ibu
- c. Nenek garis ayah *mahjub* oleh ayah
- d. Cucu baik laki laki *mahjub* oleh anak laki laki
- e. Cucu perempuan *mahjub* oleh anak laki laki dan anak perempuan
- f. Saudara kandung laki laki atau perempuan *mahjub* oleh
 - 1) Anak laki laki
 - 2) Cucu laki laki
 - 3) Ayah
- g. Saudara seayah laki laki *mahjub* oleh
 - 1) Anak laki laki
 - 2) Ayah
 - 3) Saudara kandung perempuan bersama anak atau cucu perempuan
- h. Saudara seibu laki laki atau perempuan *mahjub* oleh
 - 1) Anak laki laki
 - 2) Cucu laki laki
 - 3) Ayah
 - 4) Kakek

i. Anak laki laki dari saudara sekandung *mahjub* oleh

- 1) Anak laki laki
- 2) Cucu laki laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki laki sekandung
- 6) Saudara laki laki seayah
- 7) Saudara perempuan sekandung atau seapak yang menjadi *ashabah ma'a ghairihi*.

j. Anak laki laki dari saudara laki laki sebagai *mahjub* oleh

- 1) Anak laki laki
- 2) Cucu laki laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki laki sekandung
- 6) Saudara laki laki seayah
- 7) Anak laki laki sekandung
- 8) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menjadi *ashabah ma'a ghairihi*.

k. Paman sekandung *mahjub* oleh

- 1) Anak laki laki
- 2) Cucu laki laki
- 3) Ayah

- 4) Kakek
- 5) Saudara laki laki sekandung
- 6) Anak laki laki sebapak
- 7) Anak laki laki saudara kandung
- 8) Anak laki laki saudara sebapak
- 9) Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *ashabah ma'a ghairihi*

1. Paman sebapak *mahjub* oleh

- 1) Anak laki laki
- 2) Cucu laki laki
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara laki laki sekandung
- 6) Saudara laki laki sebapak
- 7) Anak laki laki saudara laki sebapak
- 8) Anak laki laki saudara laki sekandung
- 9) Paman sekandung dengan bapak
- 10) Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi *ashabah ma'a ghairihi*.

m. Anak laki laki dari paman sekandung *mahjub* oleh

- 1) Anak laki laki
- 2) Cucu laki laki
- 3) Ayah

- 4) Kakek
 - 5) Saudara laki laki sekandung
 - 6) Saudara laki laki seapak
 - 7) Paman sekandung
 - 8) Paman seayah
 - 9) Saudara perempuan sekandung atau seayah yang menjadi *ashabah ma'a ghairihi*.
 - 10) Anak laki laki dari paman seapak *mahjub* oleh sebelas orang tersebut diatas ditambah dengan anak laki laki dari paman sekandung.⁹
- b. *Hijab nuhsan*. Yaitu bergesernya hak seorang ahli waris dari bagian yang bergeser menjadi bagian kecil, karena adanya ahli waris lain yang mempengaruhinya, yaitu :
- 1) Suami, jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak laki laki dari perkawinan dengan suami yang sekarang maupun dengan suami sebelumnya. Dalam hal ini hak suami bergeser dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ warisan.
 - 2) Istri, jika suami meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak itu dari perkawinan dengan istri yang sekarang maupun dengan istri yang lain. Dalam hal ini bergeser $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ bagian harta warisan.
 - 3) Ibu, jika suami meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara atau lebih, haknya bergeser dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$ harta warisan.

⁹ *Ibid.*, h. 81 – 84.

- 4) Cucu perempuan, jika yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan bergeser haknya dari $\frac{1}{6}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi hak anak perempuan menjadi $\frac{2}{3}$, tetapi jika ada dua orang anak perempuan atau ada anak laki laki maka hak cucu perempuan hilang seluruhnya.
- 5) Saudara perempuan seayah, jika ada seorang saudara perempuan kandung, bergeser haknya dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{6}$, yaitu untuk melengkapi $\frac{2}{3}$, tetapi jika saudara perempuan kandung ada dua orang atau lebih atau ada saudara laki laki kandung maka, saudara perempuan seayah hilang seluruhnya.¹⁰

C. Hak Ahli Waris

Adapun ahli waris dan bagian yang diterima oleh masing masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Ahli waris *dzul furudh*

Yang berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan adalah :

- a. Suami, yaitu apabila istri meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki laki, maupun perempuan.
- b. Anak perempuan tunggal, atau tidak mempunyai saudara yang lain
Anak perempuan dari anak laki laki, yaitu jika yang memiliki anak

¹⁰ *Ibid.*, h. 83.

perempuan, serta tidak ad ahli waris lain yang menjadi penghalang perolehan harta warisan (*mahjub*).

- c. Saudara perempuan kandung, yaitu ketika dia seorang diri tidak ada orang yang menghalaginya.

Adapun yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari harta warisan adalah :

- a. Suami, jika istri yang meninggal dunia meninggalkan anak laki laki atau perempuan atau meninggalkan anak dari anak laki laki, baik laki laki maupun perempuan.
- b. Istri atau beberapa orang istri (tidak lebih dari empat orang), jika suami yang meninggal tidak meninggalkan anak laki laki atau anak perempuan, atau tidak juga anak dari anak laki laki (baik laki laki maupun perempuan)

Selanjutnya ahli waris yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ dari harta warisan adalah Istri atau beberapa orang istri (tidak lebih dari empat orang). Jika suaminya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak laki laki atau perempuan, atau anak dari anak laki laki (laki laki atau perempuan).

Yang berhak mendapatkan bagian $\frac{2}{3}$ adalah :

- a. Dua anak perempuan atau lebih
- b. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki laki
- c. Dua orang saudara perempuan kandung atau lebih
- d. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih

Yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{3}$ dari harta warisan adalah :

- a. Ibu, jika yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan cucu, tidak meninggalkan dua orang saudara atau lebih
- b. Dua orang saudara seibu atau lebih

Yang berhak mendapatkan bagian $\frac{1}{6}$ dari harta warisan adalah :

- a. Ayah , jika yang meninggal mempunyai anak
- b. Ibu, jika yang meninggal mempunyai anak
- c. Kakek , jika bersama anak atau anak dari anak laki laki
- d. Nenek, jika tidak ada ibu
- e. Satu orang anak perempuan
- f. Saudara perempuan seapak, jika bersama dengan saudara perempuan kandung
- g. Saudara laki laki atau perempuan seibu, jika tidak terhibab dengan ahli waris yang lain.¹¹

2. Ahli waris *ashabah*

Ahli waris *ashabah* yaitu bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al furudh*. Sebagai penerima sisa, ahli waris *ashabah* terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ashab al furudh*. Ahli waris *asabah* dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. *Ashabah binafsih*

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta : Pustaka al Kautsar, 1998), cet . ke I, h. 510 -511

Ashabah binafsih itu seluruhnya adalah laki laki yang secara berurutan adalah sebagai berikut :

- 1) Anak laki laki, Anak laki laki baik sendirian atau lebih, setelah diberikan kepada ahli waris *dzul furudh*.
- 2) Cucu laki laki dari anak laki laki, cucu laki laki mewarisi sebagai ahli waris asabah bila anak sudah meninggal lebih dahulu.
- 3) Ayah, sebagai ahli waris mempunyai tiga keadaan: Pertama, sebagai *dzul furudh*, karena dia mempunyai saham yang sudah ditentukan dalam al Quran, yaitu : $\frac{1}{6}$ (seperenam) maka, ayah menerima bagiannya sebanyak seperenam ($\frac{1}{6}$) sesuai dengan ketentuan yang sudah ada yaitu jika ada anak atau cucu laki laki.

Kedua, ayah sebagai *ashabah* dengan sendirinya (*ashabah binafsih*), karena dia seorang kerabat yang laki laki yang langsung berhubungan dengan yang meninggal (pewaris).

Ketiga, ayah menerima pusaka secara *dzul furudh* dan *ashabah*, mendapat ($\frac{1}{6} + \text{sisanya}$). Yaitu apabila orang yang meninggal itu meninggalkan anak perempuan seorang atau lebih, dan anak perempuan dari anak laki laki.¹²

4. Kakek, berkedudukan sebagai *ashabah* bila dalam susunan ahli waris tidak ada anak cucu laki laki dan tidak ada ayah.
5. Saudara laki laki kandung, jika mewarisi bersama anak atau cucu laki dan tidak ada ayah.

¹² Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum Hukum Warisan Dalam Syariat Islam)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1998), cet . ke I, h. 90.

6. Saudara laki laki seayah, jika tidak ada anak laki laki, cucu laki laki, ayah dan saudara laki laki kandung.
7. Anak saudara laki laki, jika tidak ada cucu laki laki, ayah atau kakek, saudara kandung laki laki dan saudara seayah laki laki.
8. Saudara seayah laki laki, jika bersama dengan anak atau cucu laki laki, ayah atau kakek, saudara laki laki kandung atau seayah dan anak saudara laki laki kandung.
9. Paman kandung, jika tidak ada anak atau cucu laki laki, ayah atau kakek, saudara laki laki kandung atau seayah.
10. Paman seayah, jika tidak ada ahli waris itu anak atau cucu laki laki, ayah atau kakek, saudara laki laki kandung atau seayah, anak laki laki kandung atau seayah, anak laki laki saudara laki laki kandung atau seayah dan paman kandung.
11. Anak paman kandung, jika tidak ada anak atau cucu laki laki, ayah atau kakek, saudara laki laki kandung atau seayah, maka anak laki laki saudara kandung atau seayah, paman kandung atau seayah.
12. Anak paman seayah, menjadi ahli waris asabah asabah jika tidak ada anak atau cucu laki laki, ayah atau kakek, saudara laki laki kandung atau seayah, anak saudara laki laki kandung atau seayah, paman kandung atau seayah, dan anak paman kandung pewaris bersamanya.

b. *Ashabah bighairihi*

Adapun kelompok ahli waris *ashabah bighairihi* adalah sebagai berikut :

- c. Anak perempuan jika bersama anak laki laki atau anak laki laki dari anak laki laki.
- d. Cucu perempuan bersama dengan cucu laki laki, atau anak laki laki dari cucu laki laki
- e. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki laki kandung. Saudara perempuan menjadi asabah karena keberadaan saudara laki lakinya dapat mewarisi harta.
- f. Saudara perempuan seayah bersama saudara laki laki seayah.

c. *Ashabah ma'a ghairihi*

Yang berhak menjadi ahli waris *ashabah ma'a ghairihi* adalah :

- g. Saudara perempuan kandung seorang atau lebih, karena bersama dengan anak perempuan, atau bersama dengan perempuan dari garis laki laki seorang atau lebih.
- h. Saudara perempuan seayah seorang atau lebih bersama dengan anak atau cucu perempuan.

Ahli waris *ashabah ma'a ghairihi* mendapatkan sisa harta peninggalan setelah pembagian untuk *ashab al furudh*. Jadi, ketika harta peninggalan setelah pembagian *ashab al furudh* dan ahli waris lainnya tidak tersisa, maka ahli waris *ashabah ma'a ghairihi* tidak mendapatkan bagian.¹³

3. Ahli waris *dzul arham*

¹³ Suparman Usman dan Yusuf Soewaminata, *Fiqh Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), cet . ke I, h.79

Secara umum ahli waris *dzul arham* ialah setiap orang yang mempunyai hubungan darah antara sesama mereka. Ulama yang mengakui adanya ahli waris *dzul arham* sepakat menetapkan bahwa adanya hak kewarisan *dzul arham* itu bila tidak ada ahli waris *asabah* dan bila sisa harta yang tidak dapat diselesaikan secara *radd*. Misalnya ahli waris yang ada hanya suami atau istri yang tidak dapat menerima *radd*. Adapun kelompok ahli waris *dzul arham* itu adalah :

- a. Kerabat garis kebawah, yaitu keturunan yang hubungannya kepada pewaris melalui perempuan, seperti anak laki laki maupun perempuan dari anak perempuan atau anak dari cucu perempuan.
- b. Kerabat garis keatas yang hubungan kepada pewaris melalui perempuan, seperti ayah dan ibu.
- c. Kerabat garis kesamping pertama, yaitu anak dari saudara perempuan, anak perempuan dari anak laki laki, dan anak dari saudara seibu.
- d. Kerabat garis kesamping kedua, yaitu saudara seibu dari ayah, saudara perempuan dari ayah kandung atau seayah, anak perempuan dari paman serta keturunannya, dan saudara dari ibu dalam segala bentuknya.
- e. Kerabat garis kesamping ketiga, yaitu saudara kakek atau nenek sebagaimana yang berlaku pada ayah dan ibu.¹⁴

¹⁴ Fatchurrahman , *Ilmu Waris*, (Bandung : al Maarif, 1981), cet . ke I, h.351.

BAB III

KAJIAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Istilah “ kompilasi” dalam bahasa latin disebut *compilare* yang kemudian berkembang menjadi *compilation* (bahasa inggris), dan *compilatie* dalam bahasa Belanda, yang berarti kumpulan dari lain lain karangan.¹ Pengertian compilation adalah *act or process of compiling* artinya, kegiatan atau proses penyusunan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian kompilasi menurut bahasa adalah kegiatan pengumpulan / penyusunan dari berbagai bahan tertulis tentang suatu masalah. Sedangkan dalam pengertian hukum, kompilasi hukum adalah sebuah buku hukum / kumpulan hukum yang memuat materi materi hukum tertentu, pendapat hukum maupun aturan hukum.²

Membicarakan sejarah Kompilasi Hukum Islam tidak bisa lepas dari kondisi hukum Islam di Indonesia, serta keberadaan lembaga peradilan agama sebagai lembaga peradilan Islam.

Hukum Islam lahir diIndonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, meskipun demikian dalam sejarah hukum Islam bagi umat Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan

¹ Wojo Wasito, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*, (Jakarta : Hasta, 1982), cet . ke II, h. 168.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademia Presindo, 1992), cet . ke I, h. 17.

keberagamannya, banyak mengalami berbagai kendala sampai pada akhirnya dapat dihimpun dalam satu buku yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada awalnya kerajaan Islam yang berdiri di Samudra Pasai, Demak, Cirebon, Banten, Mataram, Makasar dan lain lain telah melaksanakan hukum Islam diwilayah kekuasaannya.³

Pada saat VOC berdagang ke Indonesia di daerah daerah yang dikuasainya dibentuk badan badan untuk orang pribumi, dalam statuta batavia tahun 1962 disebutkan bahwa sengketa kewarisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan hukum Islam, yaitu hukum yang dipakai masyarakat sehari hari.⁴ Pada zaman VOC inilah bidang hukum keluarga diakui oleh penguasa dan dikumpulkan dalam sebuah peraturan yang disebut *compendium freijer*.⁵

Pada zaman penjajahan Belanda, hukum Islam diakui oleh pemerintah Hindia Belanda yang disebut dengan istilah *godsdientige wetten* , sebagaimana yang terdapat pada pasal 75 RR Tahun 1855 dan pasal 72 (2) RR Tahun 1855, ditegaskan apabila terjadi perselisihan dalam perkara perdata antara sesama orang pribumi maka, mereka tunduk pada putusan hakim Pengadilan Agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara menurut undang undang agama atau ketentuan mereka, namun keadaan ini berubah drastis

³ Mahfud dkk, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 1999), cet . ke I, h. 54.

⁴ Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), cet . ke I, h. 71.

⁵ Mahfud dkk, *op. cit.*, h. 54.

dengan munculnya stbl 1973 No 118 yang memberlakukan perubahan perubahan aturan pada stbl 1882 No 152 yang pada hakikatnya mengibiri Pengadilan Agama.⁶

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah menyadari akan adanya kenyataan hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam Indonesia, ternyata tidak tertulis dan masih berserakan diberbagai kitab fiqih. Sehingga muncul ketidak seragaman ketentuan hukum tentang hal yang sama antara satu kitab dengan kitab yang lain, keadaan semacam ini tentunya berakibat pada produk hukum Peradilan Agama dengan hukum materilnya masih berpegang kepada kitab fiqih yang bermacam macam. Hal ini mengakibatkan para hakim dalam memutuskan perkara belum mempunyai dasar hukum yang sama, keadaan seperti ini berdampak pada ketidakseragaman para hakim dalam memutuskan perkara yang sama. Hal demikian bila dipandang dari sudut kepastian hukum bagi suatu lembaga peradilan tentu merupakan suatu yang tidak sehat, dan tidak baik bagi para pihak yang berperkara.

Keadaan seperti diatas tidak dapat dibiarkan berlarut larut, demi menjaga kewibawaan peradilan agama, maka Pemerintah menetapkan Undang Undang No 22 Tahun 1946 dan Undang Undang No 32 Tahun 1954, dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan adanya kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan, talak, dan rujuk bagi umat Islam. Disamping itu badan Peradilan Agama dengan Undang Undang No 45 Tahun 1957 juga mengalami perkembangan pasca kemerdekaan Indonesia

⁶ *Ibid.*, h. 56 .

yaitu dibentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di pulau Jawa, Madura dan Kalimantan.⁷

Langkah penyempurnaan selanjutnya, guna menuju terwujudnya kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI, mengeluarkan Surat Edaran No B/1735 tanggal 15 Februari 1958. Dalam Surat Edaran pada huruf B dijelaskan bahwa “ untuk mendapat kepastian hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah dianjurkan untuk menggunakan kitab kitab sebagai berikut :

- a. Al Bajuri
- b. Fath al Muin dengan syarahnya
- c. Syarqai ala at Tahrir
- d. Qalyubi / Mahalli
- e. Fath al Wahab dengan syarahnya
- f. Tuhfah
- g. Targhibul Musytaq
- h. Qarwanin asy Syar'iyah Lis Sayyid bin Yahya
- i. Qawani asy Syar'iyah II Sayid Sadaqah Dahlan
- j. Syamsuri Fil al Faraidh
- k. Bughyat al Murtasyidin
- l. Fiqh ala Madzahibil arba'ah
- m. Mughni al Muhraj.⁸

⁷ Mahfud dkk, *op cit.*, h. 55.

Materi hukum tersebut jika dilihat dari seringnya dikeluarkan Surat Edaran maupun Intruksi untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus ternyata masih belum memadai, kelihatan pula dalam langkah ini kepastian hukum masih merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi dengan dasar kitab kitab fiqih tersebut. Hal ini tidak menutup kemungkinan dikarenakan adanya ketentuan terjadi adanya pembangkangan terhadap putusan Pengadilan Agama atau setidaknya ada rasa tidak puas dari pihak yang kalah yang mengacu pada kitab fiqih yang lain yang dipandang dapat menguntungkannya, belum lagi jika para hakim yang berselisih mengenai kitab fiqih mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan perkara.⁹

Hal tersebut merupakan latar belakang yang mendorong diadakannya kerjasama antara Mahkamah Agung RI Departemen Agama, dalam rangka menggarap proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi yang tertuang dalam SKB antara Menteri Agama tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi No. 07 / KMA / 1985 dan No 25 Tahun 1985 tanggal 15 Maret di Yogyakarta.

Berdasarkan Undang Undang No 14 Tahun 1970. Mahkamah Agung mendapat mandat untuk membina bidang teknis justisial Peradilan Agama. Sementara pengaturan personal keuangan dan organisasi

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Akademia Presindo, 1992), cet . ke I, h. 23.

⁹ *Ibid.*, h.23.

Pengadilan yang ada diserahkan ke Departemen masing masing. Tetapi mandat ini baru terlaksana pada tahun 1962 menyusul ditanda tangannya SKB oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. SKB inilah yang digunakan dasar hukum bagi pembinaan justisial yang dimaksud.

Pada tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama menandatangani SKB No. 07 / KMA / 1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau lebih dikenal dengan proyek KHI. Proyek yang ditetapkan untuk jangka waktu dua tahun ini secara oprasional didukung oleh Keputusan Presiden No 191 / 1985.¹⁰

Tugas pokok pelaksana proyek ini adalah untuk melaksanakan usaha pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan KHI. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah pengkajian terhadap kitab kitab fiqh yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama.

Mengacu pada tugas pokok tersebut, maka pelaksana proyek melakukan usaha usaha melalui empat jalur yaitu : Jalur kitab, jalur ulama, jalur yurisprudensi, dan jalur studi banding.¹¹

a. Jalur Kitab

Upaya pengumpulan data melalui jalur kitab ini, dengan cara melakukan penelaahan atau pengkajian terhadap kitab yang telah

¹⁰ *Ibid.*, h. 32.

¹¹ Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Mimbar Ulama, 1986), cet . ke I, h. 12.

dilegitimasi oleh Departemen Agama sebagai landasan para hakim, dan kitab kitab lain diluar madzhab Syafi'i termasuk karya pembaharu seperti: Imam Ibnu Taimiyah dan fatwa fatwa yang berkembang yang dilakukan oleh MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahsul Masail NU dan lain lain.

Dengan cara menginventarisir problem - problem hukum dan meminta pendapat serta argumentasi hukumnya kepada perguruan tinggi Islam (IAIN) di Indonesia.¹²

a. Jalur Ulama

Pengumpulan data melalui jalur ulama, dengan cara mewawancarai para ulama yang berada di 10 lokasi di Indonesia, baik atas nama perorangan, pengasuh pondok pesantren, maupun mewakili ormas Islam yang dipilih oleh panitia pusat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

Tokoh ulama yang dipilih telah diperkirakan kredibilitas, pengetahuan dan kewibawaannya. Secara teknis mereka dipertemukan dan diwawancara secara kolektif, dan sebagian lagi diwawancara secara parsial individual.¹³

b. Jalur Yurisprudensi, penelitian yurisprudensi dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, yang telah dihimpun kedalam 16 buku yaitu :

¹² *Ibid.*, h. 12.

¹³ M Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, (Jakarta : Wacana Ilmu, 1994), ce t. ke I, h. 32.

- 1) Himpunan putusan PA / PTA sebanyak 4 buku
- 2) Himpunan fatwa fatwa ulama sebanyak 4 buku
- 3) Yurisprudensi PA sebanyak 5 buku
- 4) Law report sebanyak 4 buku

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencermati putusan putusan yang masih diperlukan dan dapat diaplikasikan. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat dilakukan secara terus menerus, karena cara ini Kompilasi Hukum Islam dapat dievaluasi efektifitasnya.¹⁴

c. Jalur Studi Banding

Studi banding dilakukan dinegara negara Timur Tengah, seperti : Maroko, Turki, dan Mesir. Studi Banding ini dilakukan oleh H. Masrani Basran SH, beliau merupakan Hakim Agung MA RI dan Mukhtar Zarkasyi SH, yang merupakan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Depag RI.

Jalur studi banding dilakukan adalah untuk mendapatkan informasi mengenai sistem peradilan, masuknya hukum Islam dalam tatanan hukum nasional, dan sumber sumber hukum materil yang menjadi hukum terapan dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.¹⁵

Sebagai puncak proses perumusan Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya diadakan lokakarya nasional dalam rangka menyempurnakan kerja tim. Menurut Bustanul Arifin SH, lokakarya

¹⁴ *Ibid.*, h.33.

¹⁵ *Ibid.*, h.33.

ini dimaksudkan untuk menggalang ijma' ahli hukum Islam dan ahli hukum konvensional di Indonesia, sekaligus sebagai refleksi perkembangan fiqh Indonesia.¹⁶

Hasil rumusan lokakarya tersebut adalah munculnya keinginan dari berbagai pihak untuk menuangkan Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang undangan. Namun disisi lain, adapula pihak yang menginginkan agar Kompilasi dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Seiring dengan telah disahkannya Undang Undang No 7 Tahun 1989, hal ini menuntut agar Kompilasi Hukum Islam segera disahkan. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991 Mahkamah Agung bekerjasama dengan Departemen Agama dan atas restu Presiden, menuangkan Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Inpres No 1 Tahun 1991.

Isi Inpres tersebut adalah, Presiden mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk melakukan hal hal sebagai berikut : Pertama, menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas tiga buku. Kedua, menjalankan Inpres ini dengan sebaik baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.¹⁷

Menindak lanjuti Inpres tersebut, Menteri Agama mengeluarkan SK No 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 1991. Selanjutnya, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama mengeluarkan

¹⁶ Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional (Mengenang 65 Tahun Bustanul Arifin)*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), cet . ke I, h. 43.

¹⁷ *Ibid.*, h. 47.

Surat Edaran No 3694 / EV / HK. 003 / AZ / 91 Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Hal ini tersebut menandakan bahwa Kompilasi Hukum Islam, telah memperoleh pengesahan yuridis dan dapat digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama, instansi pemerintah, serta masyarakat yang membutuhkannya.¹⁸

B. Kekuatan Hukum Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam hadir dengan instrumen hukum Inpres No 1 Tahun 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan fenomena dan tata hukum yang dilematis. Pada satu sisi, pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri dan berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya. Disisi lain, Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen hukum dalam tatanan peraturan perundang undangan.¹⁹

Dalam peraturan perundang undangan tentang tertib peraturan perundang undangan, sejak tahun 1996 sampai tahun 2003 jenis Inpres tidak secara eksplisit diatur didalamnya. Dalam TAP MPRS Tahun 1966 walaupun secara eksplisit dimuat berbagai ketetapan yang berisi norma hukum, baik bersifat mengatur (*regeling*), maupun yang bersifat menetapkan (*beschikking*)

¹⁸ *Ibid.*, h. 47.

¹⁹ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), cet . ke I, h. 36.

termasuk diantaranya berupa Instruksi Menteri. Namun TAP MPRS tidak memuat jenis Inpres.²⁰

Berbeda dengan jenis tata urutan peraturan perundang undangan yang ada sesudahnya. Dalam TAP MPR No III Tahun 2000, dan Undang Undang No 10 Tahun 2004 Inpres tidak disinggung sama sekali dalam tertib peraturan perundang undangan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian bahwa Inpres merupakan arahan atau instruksi dari Presiden kepada menteri-nya.²¹

Setelah berlakunya Undang Undang No 10 Tahun 2004, dan diperkuat dengan Undang Undang No 11 Tahun 2012, instrumen hukum berupa Inpres tidak dimaksudkan sebagai peraturan perundang undangan. Hal demikian disebabkan Inpres lebih bersifat arahan dari Presiden kepada bawahannya yang bersifat teknis.

Oleh sebab itu, penggunaan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan sekedar sebuah anjuran. Hal ini terlihat dari kata kata yang dipakai dalam Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Pada diktum tersebut disebutkan bahwa "... seluruh lingkungan instansi..., dalam menyelesaikan masalah masalah dibidang hukum perkawinan, kewarisan, sedapat mungkin menerapkan

²⁰*Ibid.*, h. 36.

²¹ Yulkarnain Harahap dan Andy Omara, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Hukum Perundang Undangan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005), cet . ke I, h. 64.

Kompilasi Hukum Islam tersebut disamping peraturan perundang undangan lainnya”.

Pilihan kata “sedapat mungkin” dalam konsideran Keputusan Menteri Agama tersebut jelas menunjukkan penggunaan Kompilasi oleh instansi terkait atau masyarakat tidaklah mengikat sebagai suatu keharusan. Kompilasi hanya bersifat anjuran untuk digunakan. Dengan kata lain, instansi dan masyarakat diperbolehkan untuk tidak menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan persoalannya.

Meski secara teknis Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk kedalam tata tertib peraturan perundang undangan. Namun para hakim Pengadilan Agama tetap menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu dasar untuk memutuskan perkara. Hal ini dikarenakan, Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai fiqh khas Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang hidup (*living law*) ditengah tengah masyarakat muslim Indonesia. Sehingga para hakim Pengadilan Agama hampir tidak pernah mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara.²²

C. Materi Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan yang terdapat dalam buku II Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari 6 Bab. Bab pertama, mengenai ketentuan umum sebanyak 1 pasal, bab kedua mengenai ahli waris sebanyak 4 pasal, bab ketiga mengenai besarnya bagian ahli waris, bab keempat mengenai diuraikan tentang *aul* dan *radd*, bab kelima mengenai wasiat dan bab keenam tentang hukum hibah.

²² Abdul Ghani Abdullah, *op cit.*, h. 45.

Pasal pasal dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya buku II, terdiri dari dua bagian: Pertama, pasal pasal yang sesuai dengan fiqh *faraidh* klasik, dan Kedua, pasal pasal pembaruan dalam hukum waris.

1. Pasal pasal yang sesuai dengan fiqh *faraidh*

Pasal 171 tentang ketentuan umum, terdiri dari beberapa anak pasal yaitu a, b, c, d, dan e. Secara keseluruhan tidak berbeda dengan fiqh *faraidh* sebagaimana yang telah dipahami selama ini.²³

Pasal 172 membicarakan tentang identitas keIslaman seseorang. Hal tersebut tidak terdapat dalam literatur hukum waris Islam, namun hal ini merupakan tertib administrasi untuk mengetahui keIslaman para ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan.

Kompilasi ini mengatur bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang kewarisan secara timbal balik. Artinya, pewaris bukan Islam tidak mewarisi kepada ahli waris Islam dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan dalam pasal 172 ditegaskan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Aturan mengenai hal ini sesuai dengan pendapat jumhur fuqaha khususnya madzhab yang empat.

Pasal 174 tentang ahli waris, baik dalam hubungan darah atau perkawinan, telah sejalan dengan fiqh *faraidh* . Secara pasti ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris terdapat dalam surat al Nisa' ayat 11, 12 dan ayat 176. Pada ayat 11 dinyatakan hak

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : PT Kencana Prenada Media, 2005), cet. ke V, h.328.

kewarisan anak anak, baik laki laki maupun perempuan, orang tua laki laki maupun perempuan.

Surat al Nisa' ayat 12 disamping menyatakan kewarisan suami dan istri juga menjelaskan kewarisan saudara, baik laki laki maupun perempuan. Ayat 176 bercerita tentang kewarisan saudara laki laki dan perempuan.²⁴

Pasal 175 tentang kewajiban ahli waris terhadap harta sebelum dibagikannya harta tersebut kepada ahli waris telah sejalan dengan fiqih *faraidh*.

Pada ayat 1 poin (a) disebutkan mengurus dan menyelesaikan jenazah sampai pemakaman menjadi tanggung jawab ahli waris. Walaupun dalam al Quran tidak dijelaskan sama sekali tentang ongkos pengurusan jenazah, namun hasil ijtihad jumhur ulama menetapkan bahwa biaya pengurusan jenazah merupakan tindakan pertama yang harus dilakukan oleh ahli warisnya.

Poin (b) menyebutkan bahwa, ahli waris berkewajiban menyelesaikan hutang hutang pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris menagih hutang.

Bila diperhatikan kedua hadits Nabi Saw . Pertama, hadits yang dari Abu Hurairah menurut riwayat al Bukhari dan Muslim bahwa, Rasulullah Saw akan membayarkan hutang orang yang tidak sanggup membayarnya.²⁵ Kedua, hadits Nabi Saw dari Jabir ra yang

²⁴ *Ibid.*, h. 189.

²⁵ Bukhari, *Shahih al Bukhari* (Kairo :Dar al Mathaba'ah al Sya'bi, tth), h. 178.

diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, bahwa Nabi tidak akan mau menjadi Imam shalat jenazah seseorang yang berhutang sampai ada orang yang melunasinya hutangnya.²⁶

Dari dua hadits Nabi tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa hutang seseorang tidak akan diberatkan kepada ahli warisnya; tetapi juga tidak bebas begitu saja karena hal itu akan merugikan bagi pihak yang memberi hutang. Dalam keadaan yang demikian maka tindakan yang bijaksana, untuk tidak memberati orang yang mati dan tidak merugikan orang yang berpiutang ialah adanya kerelaan dari ahli waris untuk melunasi hutang pewaris, atau kerelaan dari orang yang berpiutang merelakan kekurangan pembayaran hutang tersebut.

Poin (c), berisi tentang kewajiban ahli waris untuk menyelesaikan wasiat pewaris. Hal tersebut telah sejalan dengan konsep yang pada fiqih *faraidh*. Sebagaimana yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 180.

Poin (d) berisi tentang kewajiban untuk membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Dalam al Quran dijelaskan tentang pokok pokok kewarisan dan hak hak ahli waris menurut bagian yang tertentu. Walaupun ungkapan dan gaya bahasa yang digunakan Allah Swt untuk menjelaskan hukumnya hanya dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi bahwa ketentuan Allah bersifat normatif, maka merupakan keharusan atau kewajiban ahli waris atau orang lain (yang

²⁶ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Kairo : Mustafa al Babiy, 1952), h.221.

ditunjuk berdasarkan kesepakatan ahli waris) untuk menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut.²⁷

Pada ayat (2) dijelaskan tentang tanggung jawab ahli waris terhadap hutang hanya sebatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya saja. Hal ini telah sesuai dengan fiqih *faraidh*. sebagaimana yang terdapat pada poin (b) tersebut diatas.

Pasal 176 tentang bagian anak dalam kewarisan baik sendiri maupun bersamaan dengan ahli waris yang lain, telah sejalan dengan ayat al Quran dan rumusannya dalam fiqih *faraidh*.

Pasal 178 tentang bagian ibu dalam tiga kemungkinan dan pasal 179 – 180, tentang bagian istri dan suami dalam dua kemungkinan juga telah sesuai dengan rumusan fiqih.

Pasal 181 tentang bagian saudara seibu dan pasal 182 tentang bagian saudara kandung dan seayah dalam segala kemungkinannya telah sesuai dengan al Quran surat al Nisa' ayat 12 dan 176.

Pasal 183 tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan bersama. Secara umum hal tersebut tidak ditemukan dalam kitab fiqih, namun jika dengan menggunakan Madzhab Hanafi maka, hal tersebut dapat diterima dengan pendekatan *takharruj*.

Penyelesaian dalam bentuk *takharruj* adalah sebarang tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendakinya. Dasar yang dipakai oleh

²⁷ Amir Syarifuddin, *op cit.*, h. 287.

ulama yang membenarkan lembaga *takharrij* ini adalah adanya kerelaan dan kesepakatan pihak yang berhak menerimanya. Para ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan tersebut, hingga dapat bertindak atas hartanya sesuai dengan kemampuannya.

Disamping itu, ulama juga menggunakan *atsar sahabi* (perbuatan para sahabat Nabi Saw) dari Abu Yusuf dari Amru Bin Dinar yang berasal dari Ibnu Abbas bahwa salah seorang janda Abdul Rahman Bin Auf bernama Tumadir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari jandanya untuk keluar dari kelompok penerima warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak delapan puluh tiga dirham.

Atsar sahabi tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dalil untuk menyimpang dari ketentuan umum yang berlaku. Tetapi kenyataannya dikalangan Madzhab Hanafi yang biasa berfikir praktis menggunakannya atas dasar kerelaan dan penerima bersama dari pihak yang berhak cara ini juga diikuti oleh hukum kewarisan Mesir.²⁸

Pasal 184 tentang pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus hak warisannya, telah sejalan dengan kehendak al Quran surat al Nisa' ayat 5 dan rumusannya dalam fiqih *faraidh*.

Pasal 186 tentang kewarisan anak yang lahir diluar nikah telah sejalan dengan kewarisan anak zina sebagaimana yang terdapat dalam fiqh *faraidh* yang menempatkannya hanya menjadi ahli waris bagi ibunya dan yang berkerabat dengan ibunya itu.

²⁸ Abu Zahrah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Kairo : Dar al Fikr al Arabiy, 1973), h. 270.

Pasal 190 tentang hak istri atas bagian harta gono gini secara langsung tidak menyangkut hak kewarisan dan dalam kedudukan sebagian yang menjadi hak pewaris, tidak menyalahi ketentuan fiqh .

Pasal 191 tentang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris atau ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya telah diatur dalam fiqh *faraidh*. Tentang ahli waris yang tidak memiliki keturunan telah diuraikan dalam fiqh faraid yaitu pemberian harta kepada baitul mal, sedangkan ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya telah dijelaskan pada fiqh faraid pada kewarisan *mafqud* (orang hilang) .

Dalam fiqh *faraidh* dijelaskan diantara persyaratan ahli waris ialah ia jelas hidup pada saat kematian pewaris dan diantara syarat pewaris ialah pasti pula kematiannya . pembicaraan tentang *mafqud* dalam kewarisan ini menyangkut dua hal yaitu : Pertama, dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan hartanya kepada ahli waris. Dan kedua, dalam posisinya sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara sah.²⁹

Pasal 192 tentang penyelesaian secara aul dan pasal 193 tentang penyelesaian secara radd. Hal tersebut telah sesuai dengan fiqh faraidh dan telah dijelaskan secara jelas dalam literatur fiqh *faraidh* tersebut.

2. Pasal pasal pembaruan dalam hukum waris

Pasal 173 membicarakan tentang halangan kewarisan yang format dan substansinya berbeda dengan fiqh dan madzhab manapun. Dalam Kompilasi dinyatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris

²⁹ Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 289.

apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dijadikannya percobaan pembunuhan, penganiayaan, apalagi memfitnah sebagai halangan, jelas tidak sejalan dengan fiqih madzhab manapun.

Dalam fiqih disebutkan bahwa pembunuhan sengaja yang menjadi sebab terhalangnya seseorang mendapatkan hak warisnya. Sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama.

Dicabutnya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah merupakan sesuatu yang baru dalam hukum waris. Oleh karena itu, pasal tersebut perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak dan khususnya para pakar hukum waris Islam yang ada di Indonesia.³⁰

Pasal 177 tentang bagian ayah dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan sebagai berikut : “ ayah mendapatkan bagian sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat seperenam”.

³⁰ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Eksistensi Dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012), cet . ke I, h. 241.

Menetapkan ayah menerima seperenam bagian dalam keadaan pewaris ada meninggalkan anak jelas telah sesuai dengan rumusan fiqih *faraidh* yang ada. Namun menetapkan ayah mendapatkan bagian sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan anak merupakan sesuatu yang baru dalam huku waris itu sendiri, sebab tidak terdapat dalam kitab fiqih manapun, termasuk Syiah. Jika al Quran dan fiqih yang dijadikan tolak ukur kewarisan ayah mendapat sepertiga ini, maka pasal 177 Kompilasi Hukum Islam telah salah secara substansial.³¹

Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dirumuskan sebagai berikut :

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan.

Pada poin (a) secara tersirat mengakui adanya ahli waris pengganti, hal ini merupakan pembaruan dalam hukum waris Islam. sehingga perlu menampungnya dalam lembaga *wasiat wajibah*.

Poin (b) menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki laki dan perempuan. Asas perimbangan ini pada umumnya digunakan oleh negara negara Barat yang menempatkan kedudukan anak laki laki sama dengan anak perempuan.³²

³¹ Amir Syarifuddin, *op cit*, h. 329.

³² *Ibid.*, h. 330.

Pasal 194 – 209 tentang wasiat dan pasal 210 – 214 tentang hibah, merupakan hal yang baru dalam hukum waris Islam. Sebab wasiat dan hibah tidak termasuk kedalam kajian hukum waris. Sebagian pihak menganggap bahwa tidak ada salahnya wasiat dan hibah masuk kedalam Buku II, karena dianggap mempunyai kesamaan yaitu peralihan hak milik dari seseorang kepada orang lain.³³

³³ *Ibid.*, h. 330.

BAB IV

HAK KEWARISAN AYAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Hak Kewarisan Ayah

Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 229 pasal yang tergabung dalam III buku. Buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku ke III tentang hukum perwakafan.

Hukum kewarisan sebagaimana yang terdapat dalam buku II dirinci pula menjadi 6 bab. Bab pertama mengenai ketentuan umum sebanyak 1 pasal, bab kedua tentang ahli waris sebanyak 4 pasal, bab ketiga mengenai besarnya bagian ahli waris yang terdiri dari 16 pasal, pada bab keempat diuraikan masalah *aul* dan *rad* sebanyak pasal. Dan bab kelima menyangkut dengan wasiat yang terdiri dari 16 pasal. Akhirnya, bab keenam buku II memuat materi hukum hibah yang berjumlah 5 pasal.

Bagian ahli waris sebagaimana diuraikan dalam bab ketiga, diantaranya termasuk menjelaskan tentang bagian ayah, baik ketika pewaris ada meninggalkan anak, maupun ketika pewaris tidak ada meninggalkan anak yang terdapat dalam pasal 177.

Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ Ayah mendapat bagian sepertiga ($\frac{1}{3}$) bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila ada anak ayah mendapat seperenam ($\frac{1}{6}$).¹

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademia Presindo, 1992), cet. ke I, h . 32.

Bila diikuti ketentuan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tentang bagian kewarisan ayah $\frac{1}{3}$ ketika pewaris tidak meninggalkan anak, maka ada beberapa kemungkinan ayah mendapat sepertiga, yaitu :

1. Bila pewaris hanya meninggalkan ayah semata.
2. Bila pewaris meninggalkan ayah dan ibu.
3. Bila pewaris meninggalkan ayah, ibu dan suami.
4. Bila pewaris meninggalkan ibu, ayah dan istri.
5. Bila pewaris meninggalkan ayah dan nenek.
6. Bila pewaris meninggalkan ayah, suami dan nenek.
7. Bila pewaris meninggalkan ayah, istri dan sebagainya.²

Ketujuh kemungkinan diatas dapat dirincikan sebagai berikut :

Kemungkinan pertama, pewaris hanya meninggalkan ayah maka, pembagiannya adalah :

Ayah : $\frac{1}{3}$

Sisa harta : $\frac{2}{3}$

Kemungkinan kedua, ahli waris terdiri dari ayah dan ibu maka, pembagiannya adalah :

Ayah : $\frac{1}{3}$

Ibu : $\frac{1}{3}$

Sisa harta : $\frac{1}{3}$

Kemungkinan ketiga, ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan suami maka, pembagiannya adalah :

² Hajar M, *Suatu Tinjauan Terhadap Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam*, (Pekanbaru : Jurnal an Nida', 1995), cet . ke I, h. 45.

Asal masalah : 6

Ayah : $\frac{1}{3} \times 6 = 2$

Ibu : $\frac{1}{3} \times 6 = 2$

Suami : $\frac{1}{2} \times 6 = 3$

Dikarenakan jumlah bagian yang diterima ahli waris ($3+2+2 = 7$), lebih besar dari asal masalah, (6). Maka terjadi '*aul*', yaitu asal masalah disamakan dengan jumlah bagian yang akan diterima ahli waris. Dalam hal ini, asal masalah berubah menjadi (7). Dari perubahan tersebut bagian yang akan diterima ahli waris adalah sebagai berikut :

Ayah : $\frac{2}{7}$

Ibu : $\frac{2}{7}$

Suami : $\frac{3}{7}$

Kemungkinan keempat, ahli waris terdiri dari ibu, ayah, dan istri maka, pembagiannya adalah :

Ibu : $\frac{1}{3} \times (12 - 3) = 3$

Ayah : $\frac{1}{3} \times 12 = 4$

Istri : $\frac{1}{4} \times 12 = 3$

Bagian yang diterima oleh masing masing ahli waris adalah :

Ibu mendapat $\frac{3}{12}$

Ayah mendapat $\frac{4}{12}$

Istri mendapat $\frac{3}{12}$

Jika dijumlah secara keseluruhan ($\frac{3}{12} + \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{10}{12}$) menyisakan harta, $\frac{2}{12}$ bila disederhanakan, maka sisa harta menjadi $\frac{1}{6}$.

Kemungkinan kelima, jika pewaris meninggalkan ahli waris ayah dan nenek maka, pembagiannya adalah :

$$\text{Ayah} : 1/3 \times 6 = 2$$

$$\text{Nenek} : 1/6 \times 6 = 1$$

Jika dijumlahkan secara keseluruhan ($2/6 + 1/6 = 3/6$). Sisa harta adalah $3/6$ atau dapat disederhanakan menjadi $1/2$).

Kemungkinan keenam, jika pewaris meninggalkan ahli waris ayah, suami dan nenek maka, pembagiannya adalah :

$$\text{Ayah} : 1/3 \times 6 = 2$$

$$\text{Suami} : 1/2 \times 6 = 3$$

$$\text{Nenek} : 1/6 \times 6 = 1$$

Jumlah keseluruhan bagian masing masing ahli waris adalah ($2/6 + 3/6 + 1/6 = 6/6$). Pada kemungkinan keenam ini harta tidak bersisa.

Kemungkinan ketujuh, jika pewaris meninggalkan ahli waris ayah istri dan sebagainya .

$$\text{Ayah} : 1/3 \times 12 = 4$$

$$\text{Istri} : 1/4 \times 12 = 3$$

Secara keseluruhan bagian masing masing ahli waris adalah ($4/12 + 3/12 = 7/12$, sisa harta $5/12$).

Pada kemungkinan pertama harta bersisa $2/3$, kemungkinan kedua harta bersisa $1/3$, kemungkinan ketiga terjadi 'aul dalam artian bahwa ayah mendapat bagian $2/7$. Kemungkinan keempat harta bersisa lagi $1/6$, kelima

harta bersisa $\frac{1}{2}$, kemungkinan keenam harta tidak bersisa, dan kemungkinan ketujuh harta bersisa $\frac{5}{12}$.³

Dari kemungkinan diatas, terlihat hanya pada kemungkinan keenam saja harta habis dibagi. Sedangkan pada kemungkinan yang lain harta tidak habis dibagi. Dalam hal ini, terlihat kekaburan Kompilasi Hukum Islam pasal 177.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA / Kumdil / 148 / VI / K / 1994 tanggal 28 Juni 1994 (Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1994 tentang pengertian pasal 177 Kompilasi Hukum Islam). Pasal ini seharusnya berbunyi : “ Ayah mendapat bagian sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu. Bila ada anak ayah mendapat seperenam”.

Surat Edaran Mahkamah Agung juga tidak dapat memberikan perubahan yang substansial. Sebab bila mengacu pada Surat Edaran tersebut, maka terdapat dua kemungkinan kasus kewarisan sebagai berikut :

1. Kemungkinan pertama, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan suami

Ayah : $\frac{1}{3}$

Ibu : $\frac{1}{3}$, sisa

Suami : $\frac{1}{2}$

Asal masalah : 6 maka, bagian masing masing ahli waris adalah

Ayah : $\frac{1}{3} \times 6 = 2$

Ibu : $\frac{1}{3} \times (6 - (2 + 2)) = 1$

Suami : $\frac{1}{2} \times 6 = 3$

³ *Ibid.*, h. 45

Dapat diakui bahwa, kemungkinan – kemungkinan tersebut sekilas tampak seperti pendapat Umar Bin Khattab, yaitu ayah mewarisi bersama suami dan ibu (penyelesaian dengan cara *Umariyataini*). Akan tetapi, bila kasus itu saja yang dijadikan sandaran dalam menetapkan pasal 177 tersebut tentu tidak tepat. Hal ini disebabkan, pendapat Umar Bin Khatab tetap memberikan bagian *ashabah* untuk ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak, dan bukan 1/3 sebagaimana yang disebutkan pada pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.

Ada beberapa alasan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bagian ayah sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan anak. Pertama, penetapan bagian ayah sepertiga dalam hal pewaris juga meninggalkan ibu dan suami adalah karena ini merupakan hasil ijtihad baru, atau paling tidak penetapan itu merupakan kelanjutan dari hasil ijtihad sebelumnya.

Sebagai alasan kedua yaitu, penetapan bagian ayah sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan ibu dan suami, tampaknya adalah agar bagian yang diperoleh ayah lebih besar dari bagian ibu atau paling tidak sama.⁴

Namun demikian, penetapan bagian sepertiga untuk ayah itu menjadi sia - sia jika Kompilasi Hukum Islam dilihat secara keseluruhan, sebab kompilasi juga menetapkan, dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan ayah, ibu dan suami atau istri maka, bagian ibu adalah sepertiga dari sisa sesudah diambil suami atau istri. Dari penetapan ibu yang

⁴ Abdul Ghafur Anshari., *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, Eksistensi Dan Adapatabilitas*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Pres, 2012), cet . ke I, h. 249

seperti ini, bagian ayah sebagai ahli waris *ashabah*, dengan sendirinya menjadi lebih besar dari bagian ibu. Jika ibu mendapat bagian dari sisa sesudah diambil suami, dan ayah *ashabah* maka, bagian ibu adalah satu dan bagian ayah adalah dua.

2. Kemungkinan kedua, pasal 177 menyebutkan “ bila ada anak ayah mendapat seperenam”. Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan jenis kelamin anak yang dimaksud. Jika ahli waris yang dimaksud adalah anak laki laki, maka ketentuan bagian ayah $1/6$ jelas telah sesuai dengan al Quran dan rumusannya dalam fiqh. Sebagaimana contoh berikut ini :

Bila ahli waris terdiri dari : ayah, ibu, suami, dan anak laki laki

a. Menurut fiqh *faraidh*

Ayah : $1/6 \times 12 = 2/12$

Ibu : $1/6 \times 12 = 2/12$

Suami : $1/4 \times 12 = 2/12$

Anak laki : *ashabah*, = $5/12$.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ayah : $1/6 \times 12 = 2/12$

Ibu : $1/6 \times 12 = 2/12$

Suami : $1/4 \times 12 = 2/12$

Anak laki : *ashabah*, = $5/12$.

Ketika ahli waris yang dimaksud adalah anak perempuan, sedangkan ayah mendapat $1/6$, maka ketentuan pasal tersebut dianggap belum sesuai dengan rumusan fiqh yang menyatakan ayah mendapat $1/6$

+ sisa. Ketentuan pasal tersebut dianggap sesuai dengan fiqih, apabila para ahli waris mengikuti pula ketentuan penyelesaian kewarisan secara *aul* (terjadinya *aul* disebabkan jumlah *furudh* dari beberapa orang ahli waris yang terkelompok pada satu kasus ternyata melebihi harta yang ada). Sebagaimana pendapat jumhur ulama, dan telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 192 (Bab IV ketentuan tentang *aul*). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh dibawah ini.

Bila ahli waris terdiri dari : ayah, ibu, suami dan anak perempuan.

a. Menurut fiqih *faraidh*.

Mula - mula ayah ditempatkan sebagai *dzul furudh*, sebab bila ayah langsung ditempatkan sebagai ashabah maka ayah tidak akan mendapat apa apa. Kemudian kekurangan bagian diselesaikan secara *aul*.

Ayah : $1/6 \times 12 = 2$

Ibu : $1/6 \times 12 = 2$

Suami : $1/4 \times 12 = 3$

Anak perempuan : $1/2 \times 12 = 6$

Jika dijumlah secara keseluruhan, ($2/12 + 2/12 + 3/12 + 6/12 = 13/12$), dalam hal ini terjadi kekurangan pada harta yang ada, maka, asal masalah bertambah menjadi 13. Sehingga bagian masing masing ahli waris adalah :

Ayah : $2/13$

Ibu : $2/13$

Suami : $3/13$

Anak perempuan : $6/13$.⁵

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ayah : $1/6 \times 12 = 2$

Ibu : $1/6 \times 12 = 2$

Suami : $1/4 \times 12 = 3$

Anak perempuan : $1/2 \times 12 = 6$

Dikarenakan terjadi kekurangan pada harta yang ada, maka asal masalah bertambah menjadi 13. Sehingga bagian masing masing ahli waris adalah :

Ayah : $2/13$

Ibu : $2/13$

Suami : $3/13$

Anak perempuan : $6/13$.⁶

Berdasarkan contoh tersebut terlihat bahwa, ketentuan ayah mendapat bagian seperenam ketika pewaris ada meninggalkan anak, telah sesuai dengan rumusan fiqih *faraidh*. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tampak memberikan ruang kepada para ahli waris. Bila ahli warisnya anak laki laki, maka ketentuan pasal 177 telah sesuai dengan rumusan fiqih. Namun jika ahli warisnya anak perempuan, para ahli waris dapat mengikuti pula ketentuan

⁵ Amir Syarifuddin, *op cit.*, h. 234.

⁶ *Ibid.*, h. 249.

penyelesaian kewarisan secara *aul* sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 129.

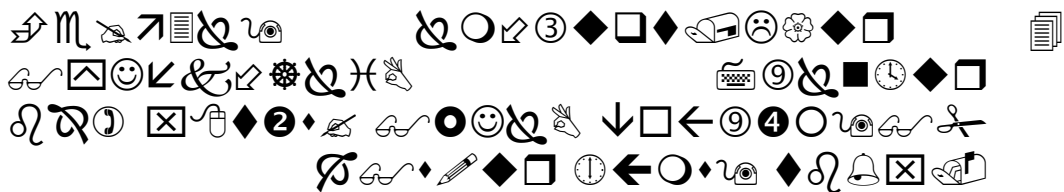
Amir Syarifuddin berpendapat “ayah mendapat bagian seperenam ketika pewaris ada meninggalkan anak, jelas telah sesuai dengan al Quran maupun rumusannya dalam fiqih *faraidh*.”⁷

B. Hak Kewarisan Ayah Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam

Pada prinsipnya terdapat dua pola yang dikembangkan oleh para mujtahid terdahulu terhadap hak kewarisan ayah. Yang pertama berasal dari ijtihaad kelompok Ahlu Sunnah. Menurutnya, bagian kewarisan ayah terjadi dalam tiga kemungkinan, yaitu :

1. Seperenam (1/6)

Ayah mendapat 1/6 bila pewaris mempunyai anak laki laki atau bersama atau bersama anak perempuan. Sebagaimana ayat 11 Surat al Nisa’ ayat 11.



Artinya : “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak”. (QS. al Nisa’ : 11).⁸

⁷ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h. 311

⁸ Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Diponegoro, 2008), cet . ke X, h. 79.

Anak (*walad*) dalam ayat diatas, mencakup anak laki laki dan perempuan. Oleh sebab itu, selama ada anak maka ayah mendapat $1/6$. Selain itu, kata *walad* juga dapat dikembangkan kepada cucu dan seterusnya kebawah. Hal ini berarti bahwa dengan adanya ahli waris cucu maka, ayah juga mendapat seperenam ($1/6$).

2. $1/6$ dan sisa

Seperti dijelaskan bahwa a meninggalkan anak, cucu dan seterusnya (ke bawah). Dalam keadaan anak(keturunan) tersebut hanya terdiri dari perempuan saja. Sedangkan harta warisan bersisa maka sisanya itu dikembalikan kepada ayah. Hal ini sangat dimungkinkan karena anak atau cucu perempuan hanya menerima secara *fardl* (bagian yang telah ditentukan). Misalnya, ahli waris : Ayah, satu anak perempuan dan istri.

Bagian ayah $1/6$, satu anak perempuan $1/2$ dan istri $1/8$. Jumlah saham ketiga ahli waris $19/24$. Oleh sebab itu harta bersisa $5/24$ yang dikembalikan kepada ayah. Jadi ayah menerima $9/24$, istri $3/24$, dan anak perempuan $12/24$. Mengembalikan sisa harta kepada ayah adalah dalam kedudukannya sebagai asabah. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi Saw riwayat Bukhari dan lainnya.

: .

أ

.

فه

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ra, dari Nabi Saw, berkata : Berikanlah bagian kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan sisanya berikanlah kepada laki laki yang paling dekat”.

(HR. Bukhari dan lainnya)⁹.

Menurut Ahlu Sunnah, ahli waris laki laki yang berhak menerima *ashabah* (sisanya), terdiri dari empat jurusan (*jihat*). Pertama, *jihat bunuwah*, yaitu anak (keturunan) pewaris laki laki dari laki laki. Artinya anak (turun) pewaris tersebut harus laki laki dan dihubungkan oleh laki laki kepada pewaris. Kedua, *jihat ubuwah* yaitu asal (*ushul*) yang terdiri dari ayah, kakek, dan seterusnya yang dihubungkan oleh laki laki. Ketiga, *jihat ukhuwah* yaitu saudara laki laki kandung / seayah serta anak anak mereka yang laki laki. Keempat *jihat umumah* yaitu saudara ayah (paman) kandung dan seayah yang laki laki serta anak anak mereka yang laki laki.¹⁰

Keempat jihat tersebut, mendapat hak waris sebagai *ashabah* secara kronologis. Oleh karena dalam contoh kasus tersebut tidak ada anak (keturunan) laki laki (*jihat bunuwah*) maka yang berhak menerima sisa adalah jihat kedua (*ubuwah*) yaitu ayah.

Dengan demikian dalam hal ayah terdapat anak perempuan tanpa ada anak laki laki kedudukannya adalah sebagai *fard* (1/6) dan *ashabah* (sisa harta).

3. *Ashabah* (sisa)

Ayah mendapat sisa harta bila pewaris tidak meninggalkan anak (keturunan). Dasarnya selain hadits, juga diperkuat dengan surat al Nisa' ayat 11.

⁹ Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Kairo :Dar al Mathabaah al Sya'bi, tth), h. 181.

¹⁰ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al Ma'arif : 1981), cet ke I, h. 341-342.

Ayat ini menjelaskan bahwa bila pewaris tidak mempunyai anak, maka ibunya mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$). Sedangkan bagian ayah dijelaskan secara terpisah oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Sebagai berikut :

$\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{3}$
 $\frac{1}{4}$
 $\frac{1}{5}$
 $\frac{1}{6}$
 $\frac{1}{7}$
 $\frac{1}{8}$
 $\frac{1}{9}$
 $\frac{1}{10}$
 $\frac{1}{11}$
 $\frac{1}{12}$
 $\frac{1}{13}$
 $\frac{1}{14}$
 $\frac{1}{15}$
 $\frac{1}{16}$
 $\frac{1}{17}$
 $\frac{1}{18}$
 $\frac{1}{19}$
 $\frac{1}{20}$
 $\frac{1}{21}$
 $\frac{1}{22}$
 $\frac{1}{23}$
 $\frac{1}{24}$
 $\frac{1}{25}$
 $\frac{1}{26}$
 $\frac{1}{27}$
 $\frac{1}{28}$
 $\frac{1}{29}$
 $\frac{1}{30}$
 $\frac{1}{31}$
 $\frac{1}{32}$
 $\frac{1}{33}$
 $\frac{1}{34}$
 $\frac{1}{35}$
 $\frac{1}{36}$
 $\frac{1}{37}$
 $\frac{1}{38}$
 $\frac{1}{39}$
 $\frac{1}{40}$
 $\frac{1}{41}$
 $\frac{1}{42}$
 $\frac{1}{43}$
 $\frac{1}{44}$
 $\frac{1}{45}$
 $\frac{1}{46}$
 $\frac{1}{47}$
 $\frac{1}{48}$
 $\frac{1}{49}$
 $\frac{1}{50}$
 $\frac{1}{51}$
 $\frac{1}{52}$
 $\frac{1}{53}$
 $\frac{1}{54}$
 $\frac{1}{55}$
 $\frac{1}{56}$
 $\frac{1}{57}$
 $\frac{1}{58}$
 $\frac{1}{59}$
 $\frac{1}{60}$
 $\frac{1}{61}$
 $\frac{1}{62}$
 $\frac{1}{63}$
 $\frac{1}{64}$
 $\frac{1}{65}$
 $\frac{1}{66}$
 $\frac{1}{67}$
 $\frac{1}{68}$
 $\frac{1}{69}$
 $\frac{1}{70}$
 $\frac{1}{71}$
 $\frac{1}{72}$
 $\frac{1}{73}$
 $\frac{1}{74}$
 $\frac{1}{75}$
 $\frac{1}{76}$
 $\frac{1}{77}$
 $\frac{1}{78}$
 $\frac{1}{79}$
 $\frac{1}{80}$
 $\frac{1}{81}$
 $\frac{1}{82}$
 $\frac{1}{83}$
 $\frac{1}{84}$
 $\frac{1}{85}$
 $\frac{1}{86}$
 $\frac{1}{87}$
 $\frac{1}{88}$
 $\frac{1}{89}$
 $\frac{1}{90}$
 $\frac{1}{91}$
 $\frac{1}{92}$
 $\frac{1}{93}$
 $\frac{1}{94}$
 $\frac{1}{95}$
 $\frac{1}{96}$
 $\frac{1}{97}$
 $\frac{1}{98}$
 $\frac{1}{99}$
 $\frac{1}{100}$

Dalam kasus ahli waris, ayah, ibu dan suami, atau ayah, ibu dan istri terjadi perbedaan pendapat dikalangan Ahlu Sunnah. Menurut Umar Bin

¹² Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Kairo : Daar al Mathabaah al Sya'bi, tth), Jilid V, h. 47.

Khatab, dalam kasus tersebut ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sisa. Ini berarti bahwa dalam kasus pertama (ayah, ibu dan suami), maka ayah mendapat $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta. Sedangkan dalam kasus kedua (ayah, ibu dan istri) maka, ayah mendapat $\frac{1}{2}$, maka kedua kasus ini dinamakan dengan sebutan “*kharawain*” atau “*umariyatain*”.¹³

Menurut Ibnu Abbas ra, bahwa saham ibu tetap $\frac{1}{3}$ (dari seluruh harta) hal ini berarti bahwa ayah dalam kasus pertama mendapat $\frac{1}{6}$, dan kasus kedua mendapat $\frac{5}{12}$.

Adapun pola kedua yang dikembangkan oleh kelompok Syiah. Pada prinsipnya antara kedua pola (Ahlu Sunnah dan Syiah) tersebut adalah sama. Artinya, bahwa kelompok Syiah juga mengakui bahwa bagian kewarisan ayah terjadi dalam tiga kemungkinan, yaitu $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anak (keturunan) laki laki atau bersama anak (keturunan) perempuan, $\frac{1}{6}$ dan sisa jika hanya meninggalkan anak perempuan (tanpa anak laki laki), dan mendapat sisa semata jika pewaris tidak meninggalkan anak, perbedaannya terlihat dalam dua hal, yaitu :

1. Bagian ayah $\frac{1}{6}$ dan sisa (ketika ada anak perempuan) maka, sisanya itu bukanlah dalam status ashabah. Tetapi menurut Syiah adalah status *radd*. Hal ini berarti bahwa sisanya itu tidak halnya dikembalikan kepada ayah saja, bahkan juga kepada ahli waris kerabat lainnya. Misalnya ahli waris ayah, satu anak perempuan, dan istri.

¹³ *Ibid.*, h. 239

Bagian ayah $\frac{1}{6}$, satu anak perempuan $\frac{1}{2}$, dan istri $\frac{1}{8}$. Jumlah saham ketiga ahli waris $\frac{19}{24}$, dan sisanya $\frac{5}{24}$. Sisanya dikembalikan kepada ayah dan anak perempuan. Oleh sebab itu, ayah mendapat $\frac{7}{32}$, anak perempuan $\frac{21}{32}$, dan istri $\frac{4}{32}$.

2. Yang dimaksud anak (ket

bagian kewarisan ayah menurut Syiah adalah setiap anak (keturunan) secara bilateral. Artinya, anak laki laki dan anak perempuan yang dihubungkan nasabnya oleh perempuan kepada pewaris adalah termasuk ahli waris yang mempengaruhi bagian ayah. Misalnya ahli waris ayah, satu cucu laki laki dan satu cucu perempuan (dari anak perempuan). Menurut Syiah, ayah hanya mendapat $\frac{1}{6}$, dan sisanya diberikan kepada kedua orang yang berstatus sebagai *dzul qarabat*.¹⁴ Dalam kasus yang sama, menurut dalil sunnah, ayah mendapat seluruh harta yang berstatus sebagai ashbah karena kedua cucu bukan ahli waris yang berhak.

Pakar Hukum Kewarisan yang lain pada dasarnya berpendapat sama dengan Ahlu Sunnah tentang bagian kewarisan ayah. Hanya saja Hazairin menetapkan bahwa bagian kewarisan ayah dapat dipengaruhi oleh ahli waris saudara. Hal disebabkan karena Hazairin menetapkan bahwa ayah tidak dapat menghibah saudara, dalam arti mereka sama berhak mewarisi harta pewaris.¹⁵

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, alih bahasa oleh : Sarmin Syukur, (Surabaya : al Ikhlas : 1988), cet . ke I, h.69.

¹⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Quran dan Hadis*, (Jakarta : Tinta Mas, 1981), cet . ke I, h. 37.

Hazairin menetapkan bahwa, bagian kewarisan ayah terjadi dalam tiga kemungkinan sebagaimana pendapat Ahlu Sunnah. Namun pembagian dalam tiga alternatif tersebut dapat juga dipengaruhi oleh saudara sebagaimana dipengaruhi oleh anak pewaris.¹⁶

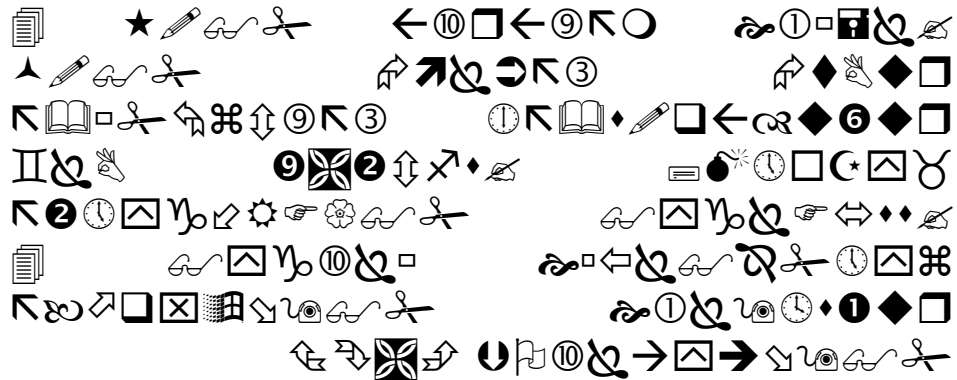
Bila dipedomani hasil pemikiran mujtahid terdahulu (termasuk Syiah dan Hazairin) yang berpendapat bahwa ayah berkedudukan sebagai *ashabah /dzul qarabat* ketika pewaris tidak meninggalkan anak, maka tidak akan muncul keraguan dalam menyelesaikan harta dan sekaligus mempunyai sandaran hukum yang kuat.

Perbedaan mendasar terlihat pada Pasal 177 dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang bagian kewarisan ayah yang mendapat bagian 1/3 ketika pewaris tidak meninggalkan anak. Hal ini tidak ditemui dalam pembahasan para pakar hukum waris Islam yang berkembang (termasuk Syiah dan Hazairin), dan tidak mempunyai sandaran hukum sama sekali. Oleh sebab itu, isi pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tentang bagian kewarisan ayah yang mendapat 1/3 ketika pewaris tidak meninggalkan anak perlu ditinjau kembali. Sedangkan, ketentuan mengenai bagian ayah mendapat seperenam, telah sesuai dengan al Quran dan rumusannya dalam fiqih. Sehingga dalam hal ini tidak perlu dilakukan peninjauan ulang.

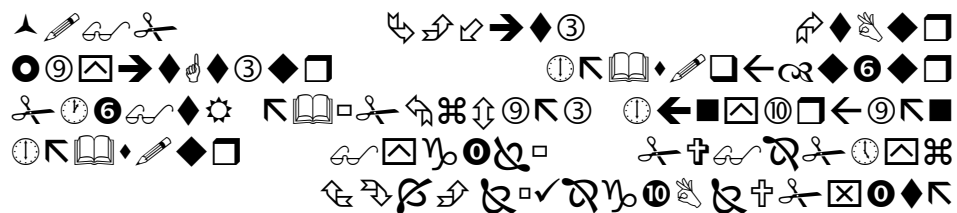
Kompilasi Hukum Islam pasal 177 perlu ditinjau kembali, karena tidak sesuai dengan al Quran maupun rumusannya dalam fiqih *faraidh*.

¹⁶ *Ibid.*, h. 37.

Kewajiban untuk mengikuti ketentuan al Quran berdasarkan pada surat al Nisa' ayat 13, sebagai berikut :



Artinya : “Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar”. (QS. al Nisa' : 13).¹⁷



Artinya : “Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”. (QS. al Nisa' : 14).¹⁸

Selain ayat, hadits Rasulullah Saw juga mewajibkan kepada umat Islam, agar membagi harta kewarisan sesuai dengan ketentuan / *khitab* Allah Swt. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.

بَيْنَ أَهْلٍ

¹⁷ Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Diponegoro, 2008), cet . ke X, h. 79.

¹⁸ Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Diponegoro, 2008), cet . ke X, h. 79.

Artinya : “Bagilah harta pusaka ahli waris menurut kitabullah”.

(HR. Muslim).¹⁹

Dari ayat dan hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam ketika melaksanakan pembagian harta warisan seorang muslim maka, sudah seharusnya mengikuti ketentuan-ketentuan Allah Swt dan Rasulullah Saw. Hal ini disebabkan, Allah Swt telah menjelaskan secara terperinci didalam al Quran mengenai hukum waris. Begitu pula dengan hadits - hadits Rasulullah Saw yang berbicara tentang hukum waris, semakin menguatkan ketentuan - ketentuan hukum waris yang tercantum di dalam al Quran .

¹⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, (Kairo : Daar al Mathabaah al Sya'bi, tth), h. 229.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian terhadap Kompilasi Hukum Islam pasal 177 tentang bagian kewarisan ayah, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tentang hak kewarisan ayah mendapat sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan, tetapi meninggalkan ibu dan suami. Hal ini berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor MA / Kumdil / 148 / VI/ K/1994 tanggal 28 Juni Tahun 1994. Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa, “ ayah mendapat sepertiga bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan ibu dan suami.
2. Menurut Hukum Kewarisan Islam yang telah disepakati oleh jumhur ulama menyatakan bahwa, hak kewarisan ayah terdiri dari tiga alternatif, yaitu : Pertama, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ ketika pewaris meninggalkan anak laki laki, kedua, ayah mendapat $\frac{1}{6} + \text{sisanya}$ ketika pewaris meninggalkan anak perempuan, dan ketiga, ayah mendapat *ashabah* (sisanya), ketika pewaris tidak meninggalkan anak. Sedangkan pada Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ ayah mendapat $\frac{1}{3}$ ketika pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan ibu dan suami. Bila ditinjau menurut perspektif Hukum Islam maka, penetapan ayah mendapat $\frac{1}{3}$ tersebut, tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini disebabkan Pasal 177 tersebut tidak mempunyai

dasar hukum sama sekali baik dalam al Quran, Hadits Rasulullah Saw, dan rumusan fiqh. Penetapan ayah mendapat $\frac{1}{3}$, juga tidak tercantum dalam pembahasan pakar Hukum Kewarisan Islam, baik Syiah maupun Hazairin.

B. Saran

1. Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam tentang hak waris ayah mendapat sepertiga ketika pewaris tidak meninggalkan anak, perlu ditinjau kembali. Hal ini disebabkan, penetapan bagian ayah sepertiga tersebut tidak sesuai dengan al Quran, hadits, dan dalam rumusan fiqh *faraidh*. Sedangkan, ketika pewaris meninggalkan anak, ayah mendapat bagian $\frac{1}{6}$, telah sesuai dengan al Quran dan rumusannya dalam fiqh, sehingga tidak perlu dilakukan peninjauan ulang.
2. Pasal 177 dirasa perlu untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan Hukum Kewarisan Islam yang ada, agar tidak menimbulkan keragu – ragan ditengah umat Islam. Khususnya umat Islam Indonesia yang menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama khususnya dalam menyelesaikan kewarisan.
3. Meskipun secara hierarki peraturan perundang undangan, Kompilasi Hukum Islam tidak dimaksudkan sebagai salah satu sumber hukum karena instrumen hukumnya yang bersifat Inpres. Namun Kompilasi Hukum Islam tetap dianggap sebagai salah satu hukum yang hidup di tengah - tengah masyarakat muslim Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, Kairo : Daar al Fikr al Arabiy, 1973
- Abdurrahman , *Kompilasi Hukum Islam DiIndonesia*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992, cet. ke I
- Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. Mengenang 65 Tahun Prof. Bustanul Arifin SH*, Jakarta : Gema Insani Press, 1996, cet. ke I
- Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi dan Adaptabilitas)*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012, cet. ke I
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, cet. ke I
- Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Kairo : Mustafa al Babiy, 1952)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Prenada Media, 2005, cet. ke III
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo : Dar al Mathaba'ah al Sya'bi, tth
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 2003, cet. ke III
- Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Diponegoro, 2008, cet. ke X
- Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung : al Ma'arif, 1981, cet. ke I
- Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2007, cet. ke I
- *Suatu Tinjauan Terhadap Pasa 177 Kompilasi Hukum Islam Pekanbaru : Jurnal An Nida' , 1995, cet. ke I*
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an dan Hadith*, Jakarta : Tintamas, 1964, cet. ke I
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2008, cet. ke I

- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003, cet. ke II
- Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, Jakarta : Fokus Media, 2007, cet. I
- Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif DiIndonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, cet. ke I
- Mahfud dkk, *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1999, cet. ke I
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, alih bahasa oleh: Sarmin Syukur, Surabaya : al Ikhlas, 1988, cet. ke I
- Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Mimbar Ulama, 1986, cet. ke I
- M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Jakarta : Wacana Ilmu : 1994, cet. ke I
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2005, cet. ke I
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, cet. ke I
- Syaik Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 1998, cet. ke I
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1994
- Superman Usman dan Yusuf Suwaminata, *Fiqh Mawaris, Hukum Waris Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama , 1997, cet. ke I
- Tengku Muhammad Hasby as Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973, cet. ke I
- Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991, cet. ke I
- Wojo Wasito, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*, Jakarta : Hasta, 1982, cet. ke I
- Yulkarnain Harahap dan Andi Omara, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Persfektif Hukum Perundang Undangan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005, cet. ke I

